

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi yang sudah sangat pesat, tentunya peranan akuntansi semakin penting untuk memberikan informasi tentang keuangan yang terjadi pada saat bertransaksi. Maka setiap organisasi atau perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi ataupun perusahaan. Dalam daerah juga dilakukan pemantauan tentunya dalam hal peningkatan ekonomi sehingga dapat diketahui perkembangan suatu daerah tersebut. Untuk meningkatkan otonomi daerah pemerintah melakukan upaya pembentukan program pada desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Pembangunan BUM Des dapat membantu pertumbuhan perekonomian pedesaan serta dapat membantu masyarakat setempat.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) ini juga menjadi salah satu solusi untuk penambahan pendapatan desa sehingga tidak hanya bergantung pada dana yang di dapat dari pemerintahan. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi atau pelayanan umum yang di kelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Dengan diberlakukannya UU Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dinilai bisa menjadi salah satu alat perjuangan desa. Salah satu informasi yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dalam menjabarkan perkembangan kondisi keuangan serta kinerja yang telah dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) adalah laporan keuangan. Dengan adanya laporan bisa mempermudah melihat kondisi keuangan serta bisa melihat keuntungan yang diperoleh suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Des).

Organisasi ekonomi Pedesaan merupakan bagian penting serta masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi

pedesaan. Maka dari itu di perlukan upaya sistematis untuk mendukung organisasi ini agar dapat mengelola aset ekonomi secara strategis di desa serta mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi pedesaan. Salah satau cara strategis yang dapat di pertimbangkan adalah dengan pendirian Badan Usaha Miliki Desa (BUM Des). Pendirian BUM Des ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat di pertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan BUM Des ini sudah beroperasi di beberapa jumlah desa lainnya dan memberi keuntungan serta menambah pemasukan untuk keuangan desa. (Yusri et al., 2022)

Menurut IAI dalam SAK EMKM (IAI, 2022) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah. Undang-undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. Standar ini ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang di atur dalam SAK ETAP.

Berdasarkan hasil penelitian (Yusri et al., 2022) bahwa penerapan standar akuntansi keuangan EMKM pada laporan keuangan BUM Desa Al-Barokah Perian, Desa Perian belum diterapkan. BUM Desa Al-Barokah Perian hanya melaporkan pemasukan dan pengeluaran kas serta neraca dan laba rugi yang dibuat dengan cara sederhana. BUM Desa Al-Barokah Perian belum menerapkan laporan keuangan yang berlaku umum meliputi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan neraca lajur. Serta laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Berdasarkan hasil penelitian (Putri, 2020) bahwa penyusunan laporan keuangan BUM Desa Karya Mandiri belum sesuai berdasarkan SAK EMKM. Laporan keuangan BUM Desa Karya Mandiri hanya terdiri dari pencatatan bukti transaksi kedalam aliran kas masuk dan aliran kas keluar sesuai dengan tanggal transaksi berjalan. Pembuat laporan keuangan BUM Desa Karya Mandiri tidak mengklasifikasikan setiap transaksi ke dalam suatu pos-pos akun aktiva dan pasiva, maupun akun pendapatan dan beban. Sehingga tidak diketahui berapa jumlah aset, modal, pendapatan dan beban pada periode laporan keuangan BUM Desa Karya Mandiri. Berdasarkan hasil penelitian (Amelia et al., 2023) bahwa UD. Multi Jaya Panglong sudah menerapkan praktet akuntansi, namun dalam pencatatan laporan keuangan mereka belum sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Laporan keuangan UD. Multi Jaya Panglong adalah laporan laba rugi.

BUM Desa Wahana Mandiri adalah usaha desa milik Pemerintah Desa Perkebunan Bukit Lawang yang bergerak dalam usaha ekonomi. BUM Desa Wahana Mandiri memiliki 4 unit usaha yaitu Depot Air Bersih Isi Ulang, Simpan Pinjam (SPP), Unit Usaha Penginapan Mess Desa, dan Unit Usaha Ternak Ayam.

Menurut Ketua BUM Desa Wahana Mandiri Desa Perkebunan Bukit Lawang (2023) BUM Desa adalah suatu program pemerintah yang menjadi tempat untuk mengelola aset desa yang mana hasilnya kemudian dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ketua BUM Desa berharap dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha dan diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Namun, dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan pihak BUM Desa yaitu Ketua BUM Desa, Bendahara BUM Desa, Sekretaris BUM Desa sehingga didapat permasalahan pada saat melakukan pencatatan laporan keuangan BUM Desa yang masih terdapat keterbatasan pengetahuan pengelola BUM Desa mengenai standar akuntansi keuangan sehingga dalam pencatatan laporan keuangan BUM Desa Wahana Mandiri Desa Perkebunan Bukit Lawang masih dilakukan dengan sederhana.

Mereka masih mencatat uang keluar dan uang masuk. Dalam usaha yang dijalankan oleh BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang seharusnya sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pada umumnya karena Desa Perkebunan Bukit Lawang termasuk desa yang sudah maju yaitu desa yang sebagai tempat wisata, namun dengan keterbatasan pengetahuan pengelola BUM Desa mereka hanya melakukan pencatatan laporan keuangan secara sederhana. BUM Desa membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan BUM Desa yang bermanfaat bagi para pengguna. Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bukit Lawang Kecamatan Bohorok”

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah pihak BUM Desa hanya melakukan pencatatan laporan keuangan secara sederhana karena keterbatasan pengetahuan pengelola BUM Desa mengenai standar akuntansi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang dalam menyajikan Laporan Keuangan?
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan dalam penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang sudah sesuai dengan SAK EMKM?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau belum.
2. Untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah dalam penyajian laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru yang lebih mendalam tentang penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah dalam menyusun laporan keuangan badan usaha milik desa. Dan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan pemikiran penelitian dan diharapkan dapat menambah wawasan baik secara teori maupun praktek.

2. Bagi pihak BUM Desa Bukit Lawang

Bagi pihak badan usaha milik desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi terutama bagi pihak pelaku badan usaha milik desa dalam menyusun laporan keuangan dengan menerapkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah.

3. Bagi pihak akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, acuan, maupun sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya yang dapat dijadikan referensi agar memperkuat penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.